

# Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024

Gusmila Putri Sabariah<sup>1)</sup>, Satarudin<sup>2)</sup>, Ali Akbar Hidayat<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mataram, NTB, Indonesia

email: <sup>1</sup>[milaa9357@gmail.com](mailto:milaa9357@gmail.com), <sup>2</sup>[satarudin@unram.ac.id](mailto:satarudin@unram.ac.id), <sup>3</sup>[aliakbar.hd@unram.ac.id](mailto:aliakbar.hd@unram.ac.id)

Article Information

Submit: 30-06-2026

Revised: 15-07-2026

Accepted: 26-09-2026

## Abstract

*This study aims to analyze the effects of the unemployment rate, Human Development Index (HDI), economic growth, Locally Generated Revenue (PAD), and minimum wage on poverty in West Nusa Tenggara during 2019–2024. This research uses a quantitative approach with an associative design. The data are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Nusa Tenggara for 2019–2024, covering 10 regency/city cross-sections and 60 observations. Panel data analysis was conducted using EViews 12. The partial results show that the unemployment rate has a positive but statistically insignificant effect on poverty. HDI has a negative but statistically insignificant effect on poverty. Economic growth has a negative and statistically significant effect on poverty. Locally Generated Revenue has a negative and statistically significant effect on poverty. Meanwhile, the minimum wage has a negative but statistically insignificant effect on poverty. Simultaneously, the unemployment rate, HDI, economic growth, Locally Generated Revenue, and minimum wage significantly affect poverty. The  $R^2$  value of 0.994915 indicates that 99.49% of the variation in poverty is explained by the variables included in the model, while approximately 0.51% is explained by other factors outside the model.*

**Keywords:** Economic growth, HDI, PAD, Poverty level, Unemployment rate.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tahun 2019–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2024 dengan 10 unit cross-section kabupaten/kota, sehingga diperoleh 60 observasi. Analisis dilakukan menggunakan data panel dengan bantuan software EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, tingkat pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,994915 menunjukkan bahwa 99,49% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sedangkan sekitar 0,51% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

**Kata kunci:** IPM, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat pengangguran.

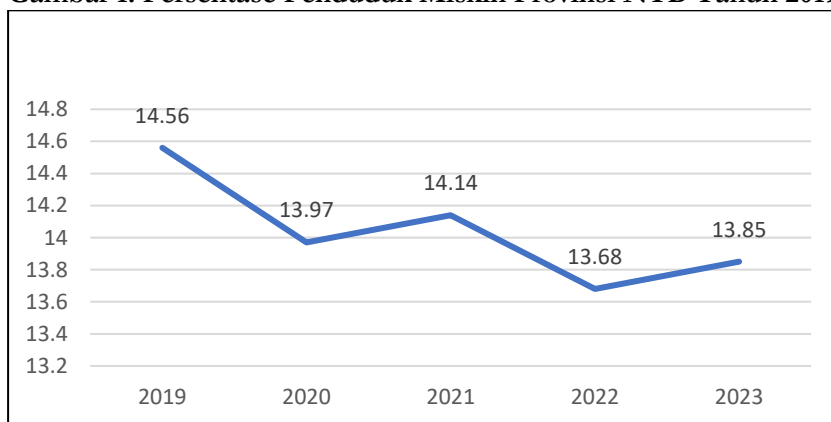
## PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja dan memperbaiki taraf hidup masyarakat adalah salah satu definisi pembangunan nasional. Pemberantasan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam upaya pembangunan suatu negara (Talaud & Sambiran, 2018). Di banyak belahan dunia, khususnya di negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah serius. Pada September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS)

melaporkan bahwa 9,54 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Triwulandari et al., 2023).

Meskipun tingkat kemiskinan lebih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia dibandingkan provinsi lainnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Terdapat pola kemiskinan yang khas di Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ini, meski memiliki potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata, pertanian, dan oerikanan, tetap menghadapi tantangan kemiskinan. Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu isu social dan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

**Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2019-2023**



Berdasarkan grafik diatas, secara garis besar tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuasi dengan kecendrungan menurun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin sebesar 14,56%, kemudian menurun menjadi 13,97% pada tahun 2020. Setelah itu terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2021 menjadi 14,14%, lalu kembali menurun ke angka terendah sebesar 13,68% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin sedikit naik menjadi 13,85%. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dengan titik tertinggi di tahun 2019 dan titik terendah di tahun 2022. Faktor-faktor seperti ekonomi, masyarakat, geografi, dan budaya saling terkait dan dapat memengaruhi kemiskinan. Dari segi ekonomi, alasan utamanya meliputi PDB yang rendah, pengangguran yang tinggi, inflasi, dan akses terbatas terhadap sumber daya (Todaro & Smith, 2015).

Pengangguran adalahh kondisi dimana inndividu yang mampu bekerja dan aktif mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang seesuai dengan keterampilan atau kualifikasinya(mankiw). Ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ketidak sesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, perubahan teknologi, atau kondisi ekonomi yang buruk. Penngangguran memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan karena tingginya angka pengangguran berarti lebih banyak individu yang tidak memiliki sumber pendaptan tetap sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap kemiskinan(Todaro, 2015).

Dalam upaya memerangi kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat penting. Salah satu faktor yang membantu menjaga angka kemiskinan tetap rendah adalah standar hidup yang tinggi. IPM yang rendah menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang buruk dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup; dengan demikian, IPM berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan (Pingkan Syabila Tri Indiaty, Kiky Asmara, & Fauzatul Laily Nisa, 2025). Ketika ipm suatu daerah rendah, hal itu menandakan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendagnya

kemampuan untuk memperoleh pekerjaan (Nurlaili et al., 2023). (Sari, 2024; Arianto & Cahyono, 2025).

Meningkatnya pendapatan riil per kapita merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup di seluruh negara. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perluasan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah hasil dari peningkatan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan meningkatnya tingkat kemiskinan (Sukirno, 2018). (Fauziah & Suman, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan melalui pungutan pajak di daerah tersebut secara hukum. Dengan adanya pungutan tersebut memberikan pemerintah daerah pemasukan serta kewenangan dalam menentukan dan membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuannya (Rahma Amalia, Lastri Khafiah, Tahta Rajani, & Muhammad Kurniawan, 2024). Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan oleh pendapatan asli dari suatu daerah adalah mengurangi kemiskinan. Bagi kota-kota yang mengalami kesulitan keuangan atau lainnya, pendapatan asli daerah dapat menjadi penyelamat (Widiyanti, 2020). (Awaludin & Wibowo, 2023).

Meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah tujuan yang dinyatakan dari program upah minimum pemerintah. Menurunkan upah adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang kerja, kata Keynes (Anggraeni., 2023).. Maka dari itu pemerintah berperan penting dalam menentukan kebijakan dalam penentuan besaran upah minimum yang ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di suatu wilayah atau daerah. Sama seperti penentuan besaran upah minimum masing-masing kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara barat, untuk itu di bawah sudah disajikan gambar grafik seberapa besar tingkat upah minimum di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara barat. (Lazuardi & Santoso, 2024).

Insiden ini menyoroti pentingnya investigasi terkini mengenai penyebab kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan empiris komprehensif terhadap literatur mengenai hubungan antara kemiskinan dan variabel-variabel berikut: tingkat pengangguran, HDI, pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), dan upah minimum. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah membuat strategi yang lebih baik dan lebih terfokus untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor seperti upah minimum Nusa Tenggara Barat, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan pendapatan daerah mempengaruhi tingkat kemiskinan, penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menemukan dan mengkuantifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat dijelaskan secara statistik adalah tujuan dari metode asosiatif (Sugiyono, 2020).

Jenis data yang dimanfaatkan pada studi ini adalah data sekunder, yaitu data yang dipakai peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang telah tersedia. Pada studi ini, data sekunder meliputi data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019–2024. Unit observasi penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima. Dengan periode pengamatan selama enam tahun, penelitian ini menghasilkan 60 observasi (10 kabupaten/kota × 6 tahun).

## Pemilihan Model

Penting untuk melakukan pengujian guna memilih salah satu dari tiga model yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Para peneliti dalam studi ini menggunakan dua jenis pengujian yang berbeda.

### Uji Chow

“Uji *Chow* digunakan untuk mengetahui apakah model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipakai untuk estimasi model yang digunakan.

- Jika nilai *Probability cross-section F* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*.
- Jika nilai *Probability cross-section F* < 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect*”.

### Uji Hausman

“Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara *Random Effect* atau *Fixed Effect* yang akan dipakai untuk estimasi model yang digunakan.

- Jika nilai *Probability cross-section random* < 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
- Jika nilai *Probability cross-section random* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect*”.

## Metode Analisis Data

Aplikasi *eviews 12* digunakan untuk analisis regresi data panel pada studi ini. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \epsilon_{it}$$

### Keterangan:

t = Periode Waktu

i = Kabupaten/Kota

$\epsilon$  = Error term (kesalahan pengganggu)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien regresi

$\alpha$  = Intercept atau konstanta

$X_5$  = Upah Minimum

$X_4$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_3$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$  = Indeks Pembangunan Manusia

$X_1$  = Tingkat Pengangguran

Y = Tingkat Kemiskinan

### Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian dalam asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Uji Normalitas

Untuk memeriksa apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal, para ahli statistik menggunakan teknik yang disebut uji normalitas. Uji ini dirancang untuk menentukan apakah residual atau variabel gangguan dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Validitas penelitian bergantung pada apakah residual dari model regresi yang baik mengikuti distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2023). Residual dianggap memiliki distribusi normal jika probabilitas Jarque Bera (JB) lebih besar dari tingkat sebenarnya ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Jika probabilitas Jarque Bera (JB) kurang dari 0,05 (tingkat sebenarnya atau  $\alpha$ ), hal ini menunjukkan bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2023) Untuk memeriksa apakah variabel independen model regresi berkorelasi, peneliti menggunakan uji multikolinearitas. Indikator yang digunakan adalah Variance Inflation

Factor (VIF). Nilai VIF digunakan sebagai analisis diagnostik untuk mengidentifikasi potensi hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen. Multikolinearitas tidak terindikasi apabila nilai VIF berada di bawah 10. Pengujian VIF dalam penelitian ini diposisikan sebagai pemeriksaan diagnostik terhadap hubungan antarvariabel independen dan bukan sebagai output estimasi utama Fixed Effect Model.

#### c. Uji Autokorelasi

Untuk menentukan apakah kesalahan residual dari periode  $t$  dan  $t-1$  (prior) berkorelasi dalam model regresi linier, digunakan uji autokorelasi. Untuk pengujian autokorelasi, bisa dipakai Uji LM. (Basuki, 2017). Jika tidak ada autokorelasi, probabilitas  $\text{Obs} \cdot R^2$  dianggap lebih besar dari 0,05 (tingkat sebenarnya atau  $\alpha$ ). Autokorelasi ada dalam model jika probabilitas  $\text{Obs} \cdot R^2$  lebih kecil dari 0,05 (tingkat sebenarnya atau  $\alpha$ ).

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2023), Untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bervariasi di seluruh data, dilakukan uji heteroskedastisitas. Ketika varians residual konstan di seluruh observasi, kita katakan bahwa terdapat homoskedastisitas; ketika bervariasi, kita katakan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas, atau tidak adanya masalah heteroskedastisitas, merupakan syarat mutlak untuk model regresi yang baik. Gejala heteroskedastisitas muncul ketika probabilitas kurang dari 0,05 (tingkat sebenarnya atau  $\alpha$ ). Gejala homoskedastisitas tidak akan muncul jika probabilitas (Prob.) lebih besar dari 0,05 (tingkat sebenarnya atau  $\alpha$ ).

### Uji Hipotesis

Menarik kesimpulan berdasarkan respons dalam hipotesis dan didukung oleh fakta-fakta yang terbukti secara statistik adalah inti dari pengujian hipotesis.

#### a. Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (Prob.) pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).  $H_0$  diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan  $H_0$  ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

#### b. Uji Signifikansi Parameter Secara Simultan (Uji F)

Baik kita ingin melihat apakah ukuran populasi dan pencapaian pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, kita dapat menggunakan uji F untuk melakukannya sekaligus.  $H_0$  diterima jika nilai probabilitas F lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05. Penolakan  $H_0$  terjadi ketika nilai probabilitas F lebih rendah dari ambang batas signifikansi 0,05.

#### c. Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi adalah alat statistik untuk menggambarkan sejauh mana dua variabel independen populasi dan tingkat pendidikan menjelaskan variabel dependen pendapatan rendah. Sederhananya,  $R^2$  adalah ukuran seberapa baik model regresi dapat menjelaskan perbedaan dalam variabel dependen. Anda dapat melihat bahwa nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Dengan nilai  $R^2$  mendekati satu, variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan dalam variabel dependen, sedangkan nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan variasi terbatas dalam variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

#### Pemilihan Model

##### a. Uji Chow

Model estimasi mana yang akan dipakai Model Efek Umum (Common Effect Model/CEM) dan Model Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM) ditentukan oleh uji Chow. Dalam uji Chow, nilai F untuk probabilitas lintas sektoral memberikan dasar untuk pengambilan keputusan (Widarjo, 2009).

**Tabel 1. Hasil Uji Chow**

Redunant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test             | Statistic  | d.f.   | Prob.  |
|--------------------------|------------|--------|--------|
| Cross-section F          | 222.524689 | (9,45) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 229.069251 | 9      | 0.0000 |

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software Eviews 12* diketahui nilai *Probability cross-section F* sebesar 0,0000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, berarti model yang di pilih adalah *Fixed Effect*.

#### b. Uji Hausman

Penggunaan lain dari uji Hausman adalah untuk memilih antara menggunakan model Efek Tetap untuk estimasi versus model Efek Acak. Dengan nilai probabilitas penampang acak sebagai panduan, uji Hausman dapat membuat keputusan (Widarjo, 2009).

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 37.535829         | 5            | 0.0000 |

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software Eviews 12* diketahui nilai *Probability cross-section F* sebesar 0,0000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, berarti model yang di pilih adalah *Fixed Effect*. Uji LM tidak diperlukan karena kedua uji tersebut menghasilkan data yang konsisten dengan hipotesis efek tetap.

**Tabel 3. Hasil Koefisien Regresi Model Fixed Effect**

| Keterangan                       | Nilai      |
|----------------------------------|------------|
| Konstanta                        | 2,659097   |
| Tingkat Pengangguran             | 0,014530   |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - 0,742078 |
| Pertumbuhan Ekonomi              | 0,008280   |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)     | - 0,068039 |
| Upah Minimum Provinsi            | 001384     |

Sumber: Data Sekunder Olah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disusun persmaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,659097 + 0,014530X_{1it} - 0,742078X_{2it} - 0,008280X_{3it} - 0,068039X_{4it} - 0,001384X_{5it}$$

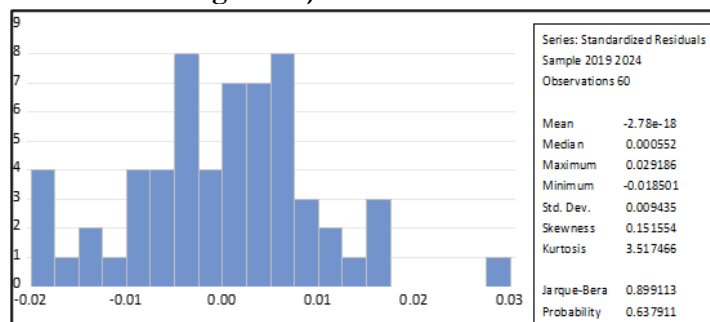
#### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi empat asumsi dasar yang menjadi landasan keabsahan hasil analisis. Suatu pengujian hipotesis dapat dinyatakan valid apabila seluruh asumsi tersebut terpenuhi dan tidak mengalami pelanggaran (Ghozali, 2023).

#### a. Uji Normalitas

Untuk memeriksa apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal, para ahli statistik menggunakan teknik yang disebut uji normalitas. Uji Jarque-Bera (JB) adalah alat populer untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal.

**Gambar 2. Histogram Uji Normalitas**



Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa nilai statistik Jarque-Bera adalah 0,899113, yang lebih tinggi dari nilai tingkat signifikansi 0,05, dan memiliki nilai probabilitas 0,637911. Dengan demikian, data penelitian ini mengikuti distribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2023) Salah satu cara untuk memeriksa apakah variabel independen model regresi Anda berkorelasi adalah dengan menggunakan uji multikolinearitas. Tidak adanya korelasi antar variabel merupakan indikasi model regresi yang berhasil. Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan untuk mengidentifikasi gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C        | 0.157184             | 80811.10       | NA           |
| X1       | 0.000158             | 19.84264       | 1,241705     |
| X2       | 0.144586             | 255815.0       | 5,693133     |
| X3       | 1.69E-05             | 2.648475       | 1,159609     |
| X4       | 0.000250             | 658.4868       | 1,842888     |
| X5       | 0.013399             | 278166.3       | 6,120301     |

Variabel-variabel yang dimaksud tidak menunjukkan multikolinearitas, seperti yang terlihat pada tabel di atas; yaitu, tingkat pengangguran, HDI, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan upah minimum semuanya memiliki nilai VIF di bawah 10.

#### c. Uji Autokorelasi

Untuk menentukan apakah kesalahan residual dari periode t dan t-1 (prior) berkorelasi dalam model regresi linier, digunakan uji autokorelasi. Untuk pengujian autokorelasi, dapat digunakan Uji LM (Basuki, 2017).

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

|               |          |                      |        |
|---------------|----------|----------------------|--------|
| F-statistic   | 0.260319 | Prob. F (2,52)       | 0.7718 |
| Obs*R-squared | 0.594782 | Prob. Chi-Square (2) | 0.7428 |

Sumber: Eviews 12

Tidak adanya autokorelasi dalam model didukung oleh fakta bahwa nilai Probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,7428, yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya yaitu 0,05, ditemukan melalui pengolahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 12.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2023), Untuk memeriksa apakah varians residual dalam model regresi bervariasi di seluruh data, dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji Breusch-Pagan-Godfrey digunakan untuk menilai heteroskedastisitas pada studi ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.166404    | 0.206409   | 0.806185    | 0.4244 |
| X1       | 0.009432    | 0.006544   | 1.441321    | 0.1564 |
| X2       | -0.197721   | 0.197965   | -0.998765   | 0.3232 |
| X3       | -0.003188   | 0.002138   | -1.490976   | 0.1429 |
| X4       | 0.008670    | 0.008228   | 1.053719    | 0.2976 |
| X5       | 0.029088    | 0.060263   | 0.482682    | 0.6317 |

Sumber: Eviews 12

Berlandaskan temuan pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews*, diketahui nilai probability X1 senilai 0,1564, probability X2 0,3232, probability X3 0,1429, probability X4 0,2976 dan probability X5 sebesar 0,6317, dari keseluruhan nilai probability yang dimiliki oleh variabel bebas menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka data yang digunakan lolos uji heteroskedastisitas.

#### Uji Hipotesis

##### a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai probabilitas masing-masing koefisien dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

**Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial)**

| Variable                   | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                          | 2.659097    | 0.396464   | 6.707031    | 0.0000 |
| Tingkat Pengguran          | 0.014530    | 0.012569   | 1.156005    | 0.2538 |
| Indeks Pembangunan Manusia | -0.742078   | 0.380245   | -1.951579   | 0.0572 |

|                          |           |          |           |        |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| Pertumbuhan Ekonomi      | -0.008280 | 0.004106 | -2.016305 | 0.0498 |
| Pendapattann Asli Daerah | -0.068039 | 0.015804 | -4.305050 | 0.0001 |
| Upah Minimum             | -0.001384 | 0.115752 | -0.011959 | 0.9905 |

Dari data yang disajikan dalam tabel, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik karena nilai statistik t-nya lebih kecil dari nilai tabel t sebesar  $\pm 1,96$  atau karena nilai probabilitasnya lebih tinggi dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Pada saat yang sama, faktor pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kemiskinan, karena nilai statistik t-nya lebih tinggi dari nilai tabel t sebesar  $\pm 1,96$  atau nilai probabilitasnya kurang dari atau sama dengan  $\alpha = 0,05$ .

### b. Uji f

Baik kita ingin melihat apakah ukuran populasi dan pencapaian pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, kita dapat menggunakan uji F untuk melakukannya sekaligus.  $H_0$  diterima jika nilai probabilitas F lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05. Penolakan  $H_0$  terjadi ketika nilai probabilitas F lebih rendah dari ambang batas signifikansi 0,05.

**Tabel 8. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared          | 0.994915 | Mean dependent var    | 1.123352  |
| Adjusted R-squared | 0.993332 | S.D. dependent var    | 0.132299  |
| S.E. of regression | 0.010803 | Akaike info criterion | -6.005669 |
| Sum squared resid  | 0.005252 | Schwarz criterion     | -5.482083 |
| Log likelihood     | 195.1701 | Hannan-Quinn criter.  | -5.800866 |
| F-statistic        | 628.8350 | Durbin-Watson stat    | 1.934601  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |                       |           |

Sumber: eviews 12

Hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak EViews 12 menunjukkan bahwa nilai statistik F sebesar 628,835 lebih tinggi dari nilai tabel F sebesar 2,42, dan nilai probabilitas F sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan secara signifikan berkaitan dengan tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan upah minimum secara simultan.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Salah satu cara untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model adalah dengan melihat koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model semakin besar.

Nilai  $R^2$  sebesar 0,994915 dihasilkan dari pengolahan data menggunakan perangkat lunak EViews 12. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 99,49% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan upah minimum yang terdapat dalam model. Sementara itu, sekitar 0,51% variasi tingkat kemiskinan dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai  $R^2$  yang tinggi pada Fixed Effect Model perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak secara langsung dimaknai sebagai hubungan kausal.

## Pembahasan

Berdasarkan metode Fixed Effect Model (FEM) yang telah terpilih sebagai pendekatan analisis utama dalam penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembahasan berikut menyajikan interpretasi hasil mengenai pengaruh tingkat Pengangguran, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024.

### a) Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024

Hasil dari pengujian parsial pada variabel tingkat pengangguran menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif namun dapat diabaikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari tahun 2019–2024, korelasi antara pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum muncul sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Hasil pengujian senada teori Todaro (2015) dalam lingkaran kemiskinan, yang menyatakan bahwa pengangguran struktural di daerah agraris cenderung memperburuk kemiskinan melalui hilangnya pendapatan tetap. Pengujian ini juga sejalan teori Mankiw (2019) tentang pengangguran friksional dan struktural yang meningkatkan kerentanan kemiskinan.

Pandangan studi ini, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkorelasi positif tetapi tidak signifikan dengan tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran di provinsi tersebut cenderung menyebabkan peningkatan kemiskinan, tetapi korelasi ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran di NTB belum menjadi faktor dominan penyebab kemiskinan, kemungkinan karena adanya program penanganan pengangguran yang efektif, seperti pelatihan kerja dan bantuan usaha kecil. Kondisi ini tercermin dari data di berbagai kabupaten/kota di NTB, dimana tingkat pengangguran relatif terkendali berkat diversifikasi ekonomi sektor pariwisata dan pertanian, serta akses pasar kerja yang semakin baik melalui infrastruktur digital dan transportasi. Pengujian ini senada studi terdahulu Triwulandari et al., (2023) di pulau Jawa yang menemukan pengangguran positif tidak signifikan, berbeda dengan Karisma & Soejoto (2010) di Jawa Timur yang signifikan positif. Meskipun tidak signifikan, pemerintah perlu terus menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor pariwisata dan perikanan NTB.

### b) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel IPM dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2024 dapat mengurangi kemiskinan dengan kondisi kemajuan pembangunan manusia di NTB secara merata serta didukung dengan indikator harapan hidup, pendidikan, dan daya beli masyarakatnya.

Hasil pengujian ini sejalan dengan teori IPM UNDP (UU 33/2004) yang menyatakan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup tingkatkan produktivitas dan kurangi kemiskinan. Penelitian ini juga sejalan dengan teori Arsyad (2010) dalam penelitian (Akmalia & Suharianto, 2025) yang menekankan kualitas sumber daya manusia sebagai pendorong pengentasan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat yang berarti setiap peningkatan IPM cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi efeknya tidak signifikan secara statistik, menandakan bahwa pembangunan manusia di NTB sudah relatif baik dan mendukung kesejahteraan.

Kondisi ini terlihat dari pencapaian IPM di kabupaten/kota NTB yang didukung fasilitas kesehatan memadai, akses pendidikan luas, serta infrastruktur pendukung seperti jalan raya dan listrik yang merata. Pengujian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa arah koefisien IPM cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Laga (2008) di Jawa Timur yang menemukan IPM tidak signifikan terhadap kemiskinan, berbeda dengan Putu et al., (2024) yang menemukan IPM negatif signifikan. Meskipun tidak signifikan, pemerintah perlu terus meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat agar IPM lebih efektif menekan kemiskinan.

#### **c) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024**

Sejauh menyangkut variabel pertumbuhan ekonomi, temuan pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel tersebut secara signifikan dan negatif memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, dari tahun 2019–2024, provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin akan mengalami penurunan kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori Sukirno (2018) Pembangunan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa serta jumlah lapangan kerja merupakan fokus utama penelitian ini. Gagasan pertumbuhan inklusif juga senada studi ini. Todaro & Smith, (2015) yang memaparkan jika pertumbuhan ekonomi yang merata dapat mengurangi kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

Penelitian ini menunjukkan jika perkembangan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nyata menurunkan kemiskinan, menandakan dinamika ekonomi NTB yang efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui ekspansi PDRB. Hal ini dapat dilihat dari sektor unggulan di kabupaten/kota NTB seperti pariwisata di Lombok, pertanian di Pulau Sumbawa, dan industri kecil yang didukung infrastruktur. Pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Triwulandari et al., (2023) di Pulau Jawa yang menemukan pertumbuhan ekonomi negatif signifikan, berbeda dengan Darma yang menemukan pengaruh negatif tidak signifikan secara nasional. Meskipun signifikan pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif menjangkau wilayah pedesaan agar efektivitas penurunan kemiskinan semakin optimal.

#### **d) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024**

Berlandaskan temuan pengujian secara parsial untuk variabel pendapatan asli daerah bisa disimpulkan jika PAD berdampak negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 dapat mengurangi kemiskinan secara efektif jika hubungan ini menggarisbawahi kekuatan fiskal daerah dalam mendorong kesejahteraan melalui alokasi anggaran strategis.

Temuan studi ini konsisten dengan pendekatan desentralisasi fiskal yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah terutama bergantung pada pendapatan yang dikumpulkan di tingkat kota untuk membayar layanan publik dan proyek pembangunan. Dalam sebuah studi yang meneliti desentralisasi fiskal dan fungsi Pendapatan Dalam Negeri (PPN) dalam kerangka otonomi daerah Indonesia, Marianus Manek menemukan bahwa memaksimalkan PPN melalui pajak dan pungutan daerah dapat mengurangi

kemiskinan dengan mendanai program sosial dan infrastruktur. Temuan ini sejalan dengan studi tersebut.

Studi ini menampakkan jika pendapatan asli daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti setiap peningkatan PAD secara nyata menurunkan kemiskinan, menandakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai program anti-kemiskinan. Hal ini tercermin di kabupaten/kota NTB melalui peningkatan PAD dari pajak retribusi dan otonomi fiskal yang mendukung infrastruktur, bantuan sosial, serta pengembangan usaha lokal.

Pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Mohamad Adiansyah Lau (2025) yang menemukan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, berbeda dengan Triwulandari et al., (2023) di pulau jawa dan Paat yang menemukan pengaruh negatif tidak signifikan. Meskipun signifikan, pemerintah daerah NTB perlu terus mengoptimalkan struktur PAD melalui peningkatan pajak pariwisata dan retribusi sektor perikanan agar dampak pengentasan kemiskinan semakin berkelanjutan.

#### **e) Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024**

Hubungan negatif namun secara statistik tidak signifikan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan ditemukan berdasarkan pengujian parsial yang dilakukan pada variabel ini. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan belum terbukti signifikan secara statistik selama periode 2019–2024. Temuan dari studi ini menguatkan hipotesis Kurva Phillips, yang menyatakan bahwa menaikkan upah minimum akan mengurangi kemiskinan informal dan meningkatkan daya beli bagi pekerja.

Studi ini menampakkan jika upah minimum berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi nusa tenggara barat yang berarti kenaikan upah minimum cenderung mengurangi kemiskinan, tapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa kebijakan upah di NTB sudah cukup kompetitif tanpa jadi penentu utama. Hal ini terlihat dari keseragaman upah minimum kabupaten/kota NTB yang didukung produktivitas sektor pariwisata dan pertanian, serta akses pekerjaan informal yang melimpah. Pengujian sejalan dengan penelitian terdahulu Utami & Rofiuddin, (2022) yang menemukan upah minimum tidak signifikan terhadap kemiskinan dan penelitian Tinta Emas Intitute di NTB yang juga negatif tidak signifikan. Berbeda dengan Deby oktaviani di madiun yang signifikan negatif. Meskipun tidak signifikan, pemerintah perlu menyinergikan kebijakan upah minimum dengan pelatihan keterampilan kerja formal di sektor-sektor kerja agar lebih efektif menekan kemiskinan.

#### **f) Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024**

Nilai R-squared sebesar 0,994915 atau sekitar 99,49% menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan dalam model dapat dijelaskan oleh kombinasi tingkat pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan upah minimum. Sekitar 0,51% variasi lainnya berada di luar model. Interpretasi tersebut merupakan ukuran goodness-of-fit model dan tidak secara langsung menunjukkan hubungan kausal sebesar 99%.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural, dua investasi jangka panjang yang penting adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang disediakan oleh PAD untuk mendanai infrastruktur dan bantuan sosial yang ditargetkan, sementara IPM meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Jika digunakan bersama-sama, keduanya memberikan dampak pengganda yang semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan studi senada

teori lingkaran kemiskinan Todaro & Smith, (2015) yang menekankan peran simultan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam memutus rantai kemiskinan. Teori ini menyoroti bahwa pengangguran struktural, rendahnya kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, serta keterbatasan fiskal daerah saling terkait dalam mempertahankan kemiskinan. Peningkatan simultan pada kelima variabel ini efektif memutus lingkaran tersebut.

Menurut teori pertumbuhan inklusif Sukirno (2018), pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus disertai dengan peningkatan IPM dan optimalisasi PAD agar manfaatnya dapat tersebar melalui PAD (UU 33/2004) memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan sesuai karakteristik lokal seperti potensi pariwisata dan perikanan di Nusa Tenggara Barat. Studi ini mendapati jika antara tahun 2019 dan 2024, tingkat kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat 99% dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, HDI, pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, dan upah minimum; sekitar 0,51% variasi sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor seperti kebijakan redistribusi, akses pasar, dan infrastruktur yang tidak diperhitungkan dalam model tersebut.

## KESIMPULAN

Berikut ini adalah temuan studi yang diambil dari bagian pembahasan dan hasil:

1. Antara tahun 2019 dan 2024, tingkat pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dari tahun 2019 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi secara negatif tetapi tidak signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Dari tahun 2019 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi.
4. Dari tahun 2019 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Dari tahun 2019 hingga 2024, upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Secara simultan, tingkat pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2019–2024.

## SARAN

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas lapangan kerja melalui pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Selain itu, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri perlu ditingkatkan agar tenaga kerja lebih siap terserap. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, meningkatkan kualitas penelitian dan memperluas atau menambah objek penelitiannya pada variabel-variabel yang memiliki kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, E., & Cahyono, H. (2025). The Effect of Human Development Index and Unemployment on Poverty in Indonesia 2018–2023. *Finance: International Journal of Management Finance*, 2(4), 59–64. <https://doi.org/10.62017/finance.v2i4.83>
- Akmalia, U., & Suhariato, J. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (Pdrbhk) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara (2006-2021) The Influence Of Human Development Index (Hdi), Gross Regional Domest. 2004, 5687–5703. <https://jicnusantara.Com/Index.Php/Jiic>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

- Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Basuki, A. T. (2017). *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews)*. Danisa Media, 135.
- Fauziah, N., & Suman, A. (2024). Determinan Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Pulau Jawa (Perspektif Teori Pro-Poor Growth & Human Capital). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1009–1014. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.03>
- Ghozali. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi*.
- KARISMA, A. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3). <https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%2Fp>
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>
- Lazuardi, M. A., & Santoso, D. B. (2024). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 958–966. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.23>
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles Of Economics By N. Gregory Mankiw*. In Cengage.
- Muslinawati, R. ., & Aziz, K. F. . (2023). Pertumbuhan Ekonomi dengan Dua Faktor Kerja di Provinsi Jawa Timur . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5093–5101. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6526>
- Mohamad Adiansyah Lau, Vecky A. J Masinambow, A. L. C. P. L. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah, Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(September), 129–142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/64161>
- Nurlaili, A., Wardani, K., & Pasya, D. J. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. 6–11.
- Pingkan Syabila Tri Indiaty, Kiky Asmara, & Fauzatul Laily Nisa. (2025). ANALISIS UPAH MINIMUM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PROBOLINGGO. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 120–133. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3247>
- Putu, D., Pardita, Y., Dharma, I. K., Putra, I. K., Agung, A., & Purnami, S. (2024). Human Development And Poverty In Indonesia. 07(08), 4856–4860. <https://doi.org/10.47191/Jefms/V7>
- Rahma Amalia, Lastri Khafiah, Tahta Rajani, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2014-2023. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(2), 80–91. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i2.1309>
- Saputra, D. D., Ismiwati, B., & Wafik, A. Z. (2025). The Effect of Economic Growth, Minimum Wage, Human Development Index on Open Unemployment Rate in West Nusa Tenggara (2019–2023). *Journal of Finance, Economics and Business*, 4(1), 80–100. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v4i1.255>
- Sari, N. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 3(2), 32–39. <https://doi.org/10.26740/independent.v3i2.51849>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Sukirno. (2018). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Pengantar Teori Makroekonomi, 14–41.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. In *Economic Development*. In Essex

Pearson Education Limited (Vol. 9571, Issue 2).

- Triwulandari, B. B., Boedirochminarni, A., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. *Jshp: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 7(2), 175–187. <https://doi.org/10.32487/Jshp.V7i2.1747>
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 28(2), 105–116. <https://doi.org/10.20473/jeba.V28I22018.105-116>
- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Belanja Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Mayoritas Muslim. *Journal Of Economics Research And Policy Studies*, 2(3), 145–160. <https://doi.org/10.53088/Jerps.V2i3.463>
- Widarjo, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga.
- Widiyanti, N. (2020). *Skripsi Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau*.